



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 219 TAHUN 2019  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pada Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya penyesuaian struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, terdapat perubahan Perangkat Daerah dan perlu dilakukan penyesuaian kembali tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur kembali dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);

12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 219 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2) diubah, sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6A

Penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023.

2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Juli 2023  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
ttd.  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
ttd.  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,



**HENDRA KUSUMA, S.H.**  
NIP. 19830930 201001 1 015

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 49 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 219 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
- Tujuan : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas; dan  
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan.
- Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP;  
2. Nilai LPPD; dan  
3. IKM.
- Tugas : Membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative
- Fungsi : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;  
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;  
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan  
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

<b>NO</b>	<b>KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat daerah yang memperoleh Nilai Reformasi Birokrasi BB	$\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh Nilai RB BB}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Laporan RB Kota	Sekretariat Daerah
		Persentase Keterpenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam LPPD sesuai ketentuan perundangan-undangan	$\frac{\text{Jumlah IKK yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Seluruh IKK}} \times 100\%$	LPPD Kota	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data IKM	Sekretariat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
- Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Tugas : 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;  
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan  
3. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;  
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;  
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan  
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD Sesuai dengan Fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat  <b>Penjelasan :</b> Hasil Survey Kepuasan anggota DPRD Kota Probolinggo Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo	Laporan SKM	Sekretariat DPRD

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
- Indikator Tujuan : Nilai SAKIP
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan  
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan berkualitas baik	$\frac{\text{Jumlah PD dengan dokumen kualitas baik}}{\text{Jumlah semua PD}} \times 100\%$ <p>Kriteria berkualitas baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra selaras dengan RPJMD</li> <li>2. Renja n+1 selaras dengan RKPD n+1</li> <li>3. Renja P-APBD selaras dengan RKPD Perubahan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPJMD</li> <li>• RKPD</li> <li>• Renstra</li> <li>• Renja</li> <li>• Laporan Monev</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;</li> <li>2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>3. Bidang Ekonomi;</li> <li>4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah</li> </ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Program dengan capaian minimal 80%	$\frac{\text{Jumlah program dengan capaian minimal 80\%}}{\text{Jumlah total program}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPJMD</li> <li>• RKPD</li> <li>• Renstra</li> <li>• Renja</li> <li>• Laporan Monev</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;</li> <li>2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;</li> <li>3. Bidang Ekonomi;</li> <li>4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah</li> </ol>
2.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan	$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan melalui pendanaan APBD}}{\text{Jumlah total hasil penelitian dan pengembangan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hasil penelitian Bidang Pemerintahan Umum</li> <li>• Data Inovasi Perangkat Daerah</li> <li>• Dokumen APBD</li> </ul>	Bidang Penelitian dan Pengembangan
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum + Kepegawaian + BMD + Program + Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas
- Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Keuangan;  
 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keuangan;  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Keuangan;  
 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Keuangan; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{PAD Tahun (n)} - \text{PAD Tahun (n-1)}}{\text{PAD(n)}} \times 100\%$	Laporan Realisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang PDL</li> <li>• Bidang PBB dan BPHTB</li> </ul>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase PD dengan Realisasi di atas 90 %	$\frac{\text{Jumlah PD dengan Realisasi Belanja di atas 90\%}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Anggaran</li> <li>• Bidang Perbendaharaan dan Kasda</li> </ul>
		Persentase PD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah PD yang LKPD nya sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Laporan Keuangan PD	Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Persentase PD yang memiliki kevalidan data BMD	$\frac{\text{Jumlah PD yang memiliki kevalidan data BMD}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Laporan BMD PD	Bidang BMD
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Inspektorat Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas
- Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP;  
2. Nilai LPPD; dan  
3. Opini BPK terhadap LKPD.
- Tugas : Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
- Fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan;  
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;  
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo	Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal memuaskan	$\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh nilai SAKIP Minimal A}}{\text{Jumlah Seluruh PD}} \times 100\%$	Dokumen laporan hasil evaluasi SAKIP	Inspektur Pembantu
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Level Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP Kota Probolinggo	Dokumen hasil penilaian maturitas SPIP	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo	Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai rekomendasi}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi atas dokumen pemantauan TLHP}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LHP APIP internal dan external</li> <li>• Pemantauan TLHP</li> </ul>	

		Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$	Dokumen Pengaduan	Inspektur Pembantu
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
- Indikator Tujuan : Indeks Profesionalitas Aparatur
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;  
 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;  
 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas Aparatur	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</li> <li>• SIMPEG</li> <li>• SAPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Formasi, Informasi dan Mutasi Pegawai</li> <li>• Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai</li> </ul>

			<p><b>Keterangan:</b></p> <p>IP= Indeks Profesionalisme</p> <p>IP<sub>i</sub>= Indeks Profesionalisme ke-i</p> <p>IP<sub>1</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi</p> <p>IP<sub>2</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi</p> <p>IP<sub>3</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja</p> <p>IP<sub>4</sub>= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p><math>W_{1j} * R_{1j}</math> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j</p> <p><math>W_{2k} * R_{2k}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k</p> <p><math>W_{3l} * R_{3l}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l</p> <p><math>W_{4m} * R_{4m}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>		
2.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum + Kepegawaian + BMD + Program + Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo  
 Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum  
 IndikatorTujuan : Persentase penurunan kasus ketentraman dan ketertiban  
 Tugas : Membantu Wali Kota dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kota  
 Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya peran serta orkemas dan partisipasi politik masyarakat	Persentase Orkemas yang aktif	$\frac{\text{Jumlah orkemas yang aktif}}{\text{Jumlah total orkemas yang terdata}} \times 100\%$	Laporan hasil kegiatan	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Umum	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah keseluruhan pemilih}} \times 100\%$	Laporan Monev Pemilu	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta mengantisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tenang, tertib dan aman di masyarakat.	Persentase Potensi Konflik Sosial Masyarakat yang terselesaikan	$\frac{\text{Potensi konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Potensi konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$	Laporan Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo	Bidang Kesatuan Bangsa
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
Tujuan	:	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana
IndikatorTujuan	:	Indeks Resiko Bencana
Tugas	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;</li><li>2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;</li><li>4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;</li><li>5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;</li><li>6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;</li><li>7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</li><li>8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ol>
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan</li><li>2. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahan Daerah  <b>Penjelasan :</b> Didapat dengan menggunakan Tool Analisa 7 Prioritas, 71 Kapasitas Daerah, 284 Pertanyaan (Kuisisioner)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda No.11 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana Kota Probolinggo</li> <li>2. Data kelurahan Tangguh Bencana</li> <li>3. Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB )</li> <li>4. Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Bromo</li> <li>5. Peta Rawan Bencana</li> <li>6. Laporan harian kejadian</li> <li>7. Laporan penanganan Kejadian Bencana</li> <li>8. Data <i>Mapping</i> Aset Dana Hibah BNPB</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>2. Kasi Kedaruratan dan Logistik</li> <li>3. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> </ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
Tujuan	: 1. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum; dan 2. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana.
IndikatorTujuan	: 1. Persentase Penurunan Kasus Ketentraman dan Ketertiban; dan 2. Indeks Resiko Bencana.
Tugas	: Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
Fungsi	: 1. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Probolinggo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{(\text{Jumlah Gangguan Trantibum Tahun } n-1) - (\text{Jumlah Gangguan Trantibum } n)}{\text{Jumlah Gangguan Trantibum } n - 1} \times 100\%$	Dokumen Laporan Operasional	Kepala Bidang Trantibum dan Penegakan Perda
2.	Meningkatnya penanganan Kebakaran	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsife Time	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah Kebakaran}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Operasional	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Linmas
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum + Kepegawaian + BMD + Program + Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo
- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Kesehatan; dan  
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Kesehatan; dan  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan
- Fungsi : 1. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kesehatan;  
2. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perizinan bidang kesehatan dan pelaksanaan pelayanan umum;  
3. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan	$\frac{\text{Persentase capaian SPM bidang kesehatan} + \text{Persentase capaian SPM Rumah Sakit}}{3}$	Laporan SPM	Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Bidang Pelayanan, Sumber Daya Kesehatan, RSUD dr. Mohammad Saleh dan RSUD Ar Rozi
		Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total            ASFR<sub>i</sub> = ASFR untuk wanita pada kelompok ke-i            i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	Laporan pada aplikasi SIPERINDU (sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk) dari BKKBN	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Layanan Kesehatan	$\frac{\text{IKM RSUD dr. Mohammad Saleh} + \text{IKM Puskesmas} + \text{IKM Laboratorium Kesehatan Daerah} + \text{IKM RSUD Ar Rozy}}{4}$	Survei Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, RSUD dr. Mohammad Saleh, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD Ar Rozi
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum} + \text{Kepegawaian} + \text{BMD} + \text{Program} + \text{Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
- Tujuan : 1. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial masyarakat; dan  
2. Meningkatnya keberdayaan dan kesetaraan gender.
- Indikator Tujuan : 1. Persentase PMKS; dan  
2. Indeks Pemberdayaan Gender.
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan  
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Hasil Penanganan PMKS</li> <li>• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial</li> <li>• Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin</li> </ul>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai evaluasi Pengarustamaan Gender	Nilai evaluasi Pengarustamaan Gender	Dokumen PUG	Bidang Pemberdayaan Perempuan
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selesai ditangani}}{\text{Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada P2TP2A}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang sudah ditangani di Tahun n</li> <li>Jumlah Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang menjadi tanggung jawab Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk ditangani</li> </ul>	Data P2TP2A	Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak
		Kategori Kota Layak Anak	Level Kota Layak Anak	Dokumen Penilaian Kota Layak Anak	
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Probolinggo
- Tujuan : 1. Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga; dan  
2. Meningkatnya Sektor Perdagangan dan Industri.
- Indikator Tujuan : 1. Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga; dan  
2. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata; dan  
4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olah Raga.	Persentase Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga Yang Dicapai	$\frac{\Sigma \text{ Prestasi Kepemudaan Cabang Olahraga yang Diraih}}{\text{Seluruh Ajang Prestasi Kepemudaan Cabor yang Diikuti}} \times 100\%$	Laporan Data	Bidang Pemuda dan Olah Raga
2.	Terwujudnya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Persentase Peningkatan Angka Kunjungan Wisatawan	$\frac{\Sigma \text{ Angka Kunjungan Wisatawan ke Kota Probolinggo pada tahun (n)} - \Sigma \text{ Angka Kunjungan Wisatawan ke Kota Probolinggo tahun (n-1)}}{\Sigma \text{ Angka Kunjungan Wisatawan ke Kota Probolinggo pada Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan Data	Bidang Destinasi Pariwisata dan Bidang Promosi Pariwisata
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan; dan  
2. Meningkatkan Daya Saing Kebudayaan Lokal.
- Indikator Tujuan : 1. Indeks Pendidikan; dan  
2. Persentase Kebudayaan lokal yang menjadi daya saing Daerah.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan  
5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENGANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan Jenjang PAUD, Pendidikan SD, Pendidikan SMP, Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A.	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SD sederajat usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat usia 13 - 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100\%$	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (3-6) Tahun.	$\frac{\text{Jumlah peserta didik PAUD usia 4 - 6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 4 - 6 tahun}} \times 100\%$	Profil Pendidikan	Bidang Pembinaan PAUD dan Nonformal
		Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	Profil Pendidikan, BPS	Bidang Pembinaan PAUD dan Nonformal
2.	Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bersertifikat pendidik	$\frac{\text{Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah bersertifikat pendidik}}{\text{Jumlah seluruh guru dan tenaga kependidikan}} \times 100$	Dapodik, Data PPG	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.	Meningkatkan pengelolaan kebudayaan menjadi daya saing daerah	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah Bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah kebudayaan yang dikelolamenjadi daya saing daerah}}{\text{Jumlah seluruh kebudayaan daerah}} \times 100$	Data Potensi Seni Budaya, Data Cagar Budaya dan Museum	Bidang Kebudayaan
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
- Indikator Tujuan : Persentase infrastruktur berkualitas baik
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Perhubungan.  
 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perhubungan;  
 3. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Perhubungan;  
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Perhubungan; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase Sarana LLAJ yang Tersedia di Kota Probolinggo	$\frac{\Sigma \text{ Ruas jalan kota yang terpenuhi Sarana LLAJ tahun (n)}}{\Sigma \text{ Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100\%$	Data Fasilitas LLAJ	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Angkutan Jalan di Kota Probolinggo	$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran tahun (n)} - \Sigma \text{Pelanggaran tahun (n-1)}}{\Sigma \text{Pelanggaran tahun (n-1)}} \times 100\%$	Rekapitulasi Laporan Hasil Operasi Gabungan Tipe B	Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
2.	Meningkatnya Kualitas Sarana Transportasi Darat dan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	Persentase Sarana Transportasi Darat yang memenuhi standar keselamatan	$\frac{\Sigma \text{Ruas Jalan Kota yang Terpenuhi Sarana Transportasi Elektrikal}}{\Sigma \text{Seluruh Ruas Jalan Kota}} \times 100\%$	Data Inventarisasi Perlengkapan Jalan	Bidang Pengembangan Transportasi
		Prosentase Angkutan Laut yang Memenuhi Standar Keselamatan	$\frac{\Sigma \text{Kapal <7GT yang memiliki Dokumen Kapal}}{\Sigma \text{Kapal <7GT yang tersedia}} \times 100\%$	Data Kapal Pengurusan Surat Ukur sip dibawah 7 GT	Bidang Pengembangan Transportasi

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika
- Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
- Indikator Tujuan : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang komunikasi
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;  
 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;  
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;  
 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan  
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada penyelenggaraan pemerintahan	Persentase e-Government perangkat daerah yang terintegrasi	$\frac{\Sigma \text{Perangkat Daerah dengan Sistem Elektronik yang Terintegrasi}}{\Sigma \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Laporan Tahunan Bidang Layanan e-Government dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang layanan e-Government dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai standar	$\frac{\Sigma \text{ Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Laporan Tahunan Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Bidang Pengelolaan Informasi Publik
2.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
- Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan  
4. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk memiliki KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el}}{\text{Jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el}} \times 100\%$	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase penduduk memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	Laporan Cakupan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya kualitas sistem informasi dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil yang valid	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan dan catatan sipil yang valid}}{\text{Jumlah data kependudukan dan catatan sipil}} \times 100\%$	Laporan data kependudukan dan pencatatan sipil	Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
		Presentase permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan catatan sipil yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permintaan data kependudukan dan catatan sipil}} \times 100\%$	Dokumen permintaan data kependudukan dan pencatatan sipil	
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
- Tujuan : 1. Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat; dan  
2. Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan secara baku.
- Indikator Tujuan : 1. Indeks minat baca masyarakat; dan  
2. Hasil audit kearsipan.
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;  
3. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan  
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung Tahun (n)} - \text{Jumlah Pengunjung Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Pengunjung Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data	Kepala Bidang : ➤ Perpustakaan dan Pembinaan dan Pemasarakatan Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Peningkatan Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n)} - \text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah PD yang telah menerapkan arsip secara baku Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan data	Kepala Bidang : ➤ Kearsipan ➤ Pembinaan dan Pemasyarakatan Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Probolinggo
- Tujuan : 1. Meningkatnya sektor perdagangan dan industri; dan  
2. Meningkatkan kemandirian pangan Daerah.
- Indikator Tujuan : 1. Persentase pertumbuhan PDRB kategori perindustrian; dan  
2. Skor pola pangan harapan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;  
3. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan; dan  
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Pertanian	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	$\frac{\text{Nilai Tambah tahun (n)} - \text{Nilai Tambah tahun (n-1)}}{\text{Nilai Tambah tahun (n-1)}} \times 100\%$ <p><b>Keterangan:</b>            Nilai Tambah tahun (n) = nilai tambah produk pertanian            Nilai Tambah = A – B – C            A = Nilai Produksi Produk Pertanian (Rp/Kg) (a)            B = Sumbangan Input lain (Rp/Kg) (b)            C = Harga Baku Produk Pertanian (Rp/Kg) (c)</p> <p>Dimana:            a = Faktor Konversi (d) * Harga Produk Pertanian            b = Biaya Lain – Lain/Bahan Baku Produk            c = Harga baku produk Pertanian            d = Hasil produksi/Bahan baku produk</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.</li> <li>• Nilai tambah yang semakin besar atas produk pertanian dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>	Laporan Hasil Pendataan Produksi Pengolah Hasil Pertanian	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Bidang Peternakan
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan	$\frac{\text{Nilai Tambah tahun (n)} - \text{Nilai Tambah tahun (n-1)}}{\text{Nilai Tambah tahun (n-1)}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pendataan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p><b>Keterangan:</b>            Nilai Tambah tahun (n) = nilai tambah rata-rata 6 produk olahan ikan dominan            6 produk olahan ikan dominan adalah ikan asin, ikan asap, terasi, kerupuk, abon ikan dan olahan berbasis surimi            Nilai Tambah = A – B – C            A = Nilai Produksi Produk Perikanan (Rp/Kg) (a)            B = Sumbangan Input lain (Rp/Kg) (b)            C = Harga Baku Produk Perikanan (Rp/Kg) (c)</p> <p>Dimana:            a = Faktor Konversi (d) * Harga Produk Perikanan            b = Biaya Lain – Lain/Bahan Baku Produk            c = Harga baku produk perikanan            d = Hasil produksi/Bahan baku produk</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.</li> <li>• Nilai tambah yang semakin besar atas produk perikanan dapat berperan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak bagi peningkatan lapangan usaha dan pendapatan masyarakat yang muara akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>		

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	<p>Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki perhitungan sebagai berikut :</p> $NTP = \frac{HT}{HB} \times 100$ <p>Dimana :</p> <p>HT = Harga yang diterima petani  HB = Harga yang dibayar petani  Harga yang diterima petani (HT) dirumuskan sebagai berikut :</p> $HT = \sum a_i * P_{Ti}$ <p>Dimana :</p> <p>HT= Harga yang diterima petani  <math>P_{Ti}</math> = Harga kelompok komoditas dalam sub sector ke - i  i = tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan)  <math>a_i</math> = Pembobot dari masing - masing sub sektor ke - i</p> <p>Harga yang dibayar petani (HB) dirumuskan sebagai berikut :</p> $HB = \sum b * PB_i$ <p>Dimana :</p> <p>HB = Harga yang dibayar petani</p>	Dokumen hasil survei penghitungan NTP	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Bidang Peternakan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p><math>P_{Bi}</math> = Harga kelompok produk ke - i yang dibeli petani  <math>b</math> = Pembobot dari komoditas ke - i  <math>i</math> = Kelompok produk konsumsi pangan, non pangan (perumahan, pakaian, aneka barang dan jasa), dan sarana produksi (factor produksi, non barang modal)</p> <p>Dalam Perhitungan NTP, BPS menggunakan Indeks Laspeyres sebagai berikut :</p> $I_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} * Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} * Q_{oi}} * 100$ <p>Dimana :</p> <p><math>I_n</math> = Indeks harga bulanan bulan ke n (IT dan IB)  <math>P_{ni}</math> = Harga bulan ke n untuk jenis barang ke - i  <math>P_{(n-1)i}</math> = Harga bulan ke (n-1) untuk jenis barang ke - i  <math>P_{ni}/P_{(n-1)i}</math> = Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke - i  <math>P_{oi}</math> = Harga dasar tahun dasar untuk jenis barang ke - i  <math>Q_{oi}</math> = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke - i  <math>M</math> = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas</p>		

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan	Prosentase Peningkatan Angka Ketersediaan Energi (AKE)	$\frac{\text{AKE tahun (n-1)} - \text{AKE Standar}}{\text{AKE Standar}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pendataan/ Penghitungan AKE	Bidang Ketahanan Pangan
		Prosentase Peningkatan Angka Ketersediaan Protein (AKP)	$\frac{\text{AKP tahun (n-1)} - \text{AKP Standar}}{\text{AKP Standar}} \times 100\%$	Laporan Hasil Pendataan/ Penghitungan AKP	Bidang Ketahanan Pangan
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Indeks)	<p>NTPi : <math>Y_t/E_t</math>  Yt : <math>YF_t + YNF_t</math>  Et : <math>EF_t + EK_t</math>  Yft : Total pendapatan Pembudidaya Ikan dari usaha perikanan periode t  YNFt : Total pendapatan Pembudidaya Ikan dari usaha non perikanan periode t  EFt : Total pengeluaran Pembudidaya Ikan untuk usaha perikanan periode t  EKt: Total pengeluaran Pembudidaya Ikan untuk konsumsi Keluarga Pembudidaya Ikan Periode t  t: Periode Waktu</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tukar Pembudidaya Ikan adalah ratio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga pembudidaya selama periode waktu 1 tahun.</li> </ul>	Dokumen hasil survei penghitungan NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan)	Bidang Perikanan Budidaya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan adalah pendapatan kotor atau penerimaan rumah tangga pembudidaya.</li> <li>• Jika <math>NTP_i &gt; 1</math> berarti Rumah Tangga Pembudidaya Ikan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan non primernya atau menabung.</li> <li>• Jika <math>NTP_i = 1</math> berarti Rumah Tangga Pembudidaya Ikan hanya mampu mencukupi kebutuhan primernya saja.</li> <li>• Jika <math>NTP_i &lt; 1</math> berarti Rumah Tangga Pembudidaya Ikan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya dan mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya</li> </ul>		
		Nilai Tukar Nelayan Kecil (Indeks) (NTN)	$NTN = Y_t / E_t$ $Y_t = YF_t + YNF_t$ $E_t = EF_t + EK_t$ $NTN = Y_t / E_t$ $Y_t = YF_t + YNF_t$ $E_t = EF_t + EK_t$ $YF_t =$ Total pendapatan Nelayan dari usaha perikanan periode t $YNF_t =$ Total pendapatan Nelayan dari usaha non perikanan periode t $EF_t =$ Total pengeluaran Nelayan untuk usaha perikanan periode t $EK_t =$ Total pengeluaran Nelayan untuk konsumsi keluarga Nelayan periode t $t =$ Periode waktu	Dokumen hasil survei penghitungan NTN (Nilai Tukar Nelayan)	Perikanan Tangkap dan Pengembangan Hasil Perikanan

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Tukar Nelayan adalah ratio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu 1 tahun.</li> <li>• Pendapatan adalah pendapatan kotor atau penerimaan rumah tangga Nelayan.</li> <li>• Jika NTN&gt;1 berarti Rumah Tangga Nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan non primernya atau menabung.</li> <li>• Jika NTN=1 berarti Rumah Tangga Nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan primernya saja.</li> <li>• Jika NTN&lt;1 berarti Rumah Tangga Nelayan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya dan mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.</li> </ul>		
6.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum + Kepegawaian + BMD + Program + Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Probolinggo
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan nilai investasi Daerah; dan</li><li>2. Meningkatnya sektor perdagangan.</li></ol>
Indikator Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Angka pertumbuhan koperasi yang berkualitas;</li><li>2. Angka pertumbuhan usaha mikro yang mandiri; dan</li><li>3. Angka pertumbuhan PDRB sektor perdagangan;</li></ol>
Tugas	: Pelayanan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan Perkoperasian, pemberdayaan dan Perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM, pengembangan UMKM, perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana distribusi Perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran Produk dalam negeri, pengelolaan energi baru terbarukan.
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan izin usaha simpan pinjam;</li><li>2. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;</li><li>3. Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;</li><li>4. Pendidikan dan latihan perkoperasian;</li><li>5. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;</li><li>6. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);</li><li>7. Pengembangan UMKM;</li><li>8. Perizinan dan pendaftaran perusahaan;</li><li>9. Peningkatan sarana distribusi Perdagangan;</li><li>10. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;</li><li>11. Pengembangan ekspor;</li><li>12. Standardisasi dan perlindungan konsumen;</li><li>13. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan</li><li>14. Pengelolaan energi baru terbarukan.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Koperasi berkualitas adalah Koperasi yang memiliki kinerja aktif dalam bidang kelembagaan, kinerja usaha meningkat dan keuangan sehat serta partisipasi anggota yang kuat. Koperasi Sehat adalah koperasi yang mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya serta memenuhi kewajiban sesuai AD/ART, memenuhi kualifikasi yang baik dalam aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan jati diri.</p>	Data Keragaan Koperasi	Bidang Koperasi
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Mikro}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Aspek Usaha Mikro Yang Mandiri adalah Aspek Legalitas Usaha, Aspek Keuangan (Laporan Keuangan Terpisah), Aspek Pasar (Sebaran Pemasaran mencapai Tingkat Kota), Aspek Pelaku Usaha yang kompeten (Jumlah peserta pelatihan dengan predikat baik)</p>	Data UMKM	Bidang Usaha Mikro

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Peningkatan Nilai Perdagangan	$\text{Nilai Perdagangan tahun (n)} - \text{Nilai Perdagangan tahun (n-1)}$	Data Perdagangan	Bidang Perdagangan
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Tugas : Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup;  
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang lingkungan hidup;  
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang lingkungan hidup;  
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan  
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas air dan kualitas udara	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>Penjelasan :            IP<sub>j</sub> = Indeks Pencemaran bagi peruntukan j            C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran)            L<sub>ij</sub> = baku mutu parameter i bagi peruntukan j            M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan (TAPEN) 2. UPTD Laboratorium Lingkungan 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH) 4. UPTD Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH)

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$ <p><b>Penjelasan :</b>  <math>I_{EU}</math> adalah rata rata dari konsentrasi <math>SO_2</math> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien <math>SO_2</math> Ref <math>EU</math> dan <math>NO_2</math> hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien <math>NO_2</math> Ref <math>EU</math>            Baku mutu udara ambien Ref <math>EU</math> untuk <math>SO_2</math> adalah <math>20 \mu g/m^3</math> dan <math>NO_2</math> adalah <math>40 \mu g/m^3</math></p>	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Tata dan Penataan Lingkungan (TAPEN)</li> <li>2. UPTD Laboratorium Lingkungan</li> <li>3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan (P2KLH)</li> <li>4. UPTD Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH)</li> </ol>
		Prosentase sampah tertangani	<p>Nilai Prosentase Sampah Tertangani</p> $\frac{\sum \text{Sampah Terangkut} + \sum \text{Sampah Terolah}}{\sum \text{Timbulan Sampah Kota}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b>            Timbulan Sampah : L/orang atau unit/hari            Kota Besar : 3 L/org/hari            Kota Kecil : 2,5 L/org/hari</p>	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Sampah (P2S)</li> <li>2. UPTD Pengolahan Sampah (PS)</li> </ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <p>Rumus di Tutupan Hutan;</p> <p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Kanal}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Kanal}{Luas\ FBEG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH\_FLG\_Bakar}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH\_FBG\_Bakar}{Luas\ FBEG}</math></p> <hr/> <p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung;</p> <p>W kanal di Lindung : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLG\_Kanal + BL\_FLG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W kanal di Budidaya : <math>0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Kanal + BL\_FBG\_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FBEG}</math></p> <p>W terbakar di Lindung : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH\_FLB\_Bakar + BL\_FLG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}</math></p> <p>W terbakar di Budidaya : <math>0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{(BH\_FBG\_Bakar + BL\_FBG\_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FBEG}</math></p>	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Konservasi dan Pertamanan</li> <li>2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kemitraan Lingkungan(P2KLH)</li> <li>3. UPTD Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH)</li> </ol>
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	:	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya sektor industri; dan</li><li>2. Meningkatnya kuantitas penyelenggaraan tenaga kerja.</li></ol>
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Angka pertumbuhan PDRB sektor perindustrian; dan</li><li>2. Tingkat pengangguran terbuka.</li></ol>
Tugas	:	Melaksanakan tugas di bidang Perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha Industri Daerah, pengelolaan sistem informasi industri nasional, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan pembangunan industri;</li><li>2. Pengendalian izin usaha Industri Daerah;</li><li>3. Pengelolaan sistem informasi industri nasional;</li><li>4. Perencanaan tenaga kerja, meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);</li><li>5. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;</li><li>6. Penempatan tenaga kerja;</li><li>7. Hubungan industrial;</li><li>8. Perencanaan kawasan transmigrasi, meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;</li><li>9. Pembangunan kawasan transmigrasi, meliputi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah; dan</li><li>10. Pengembangan kawasan transmigrasi, meliputi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.</li></ol>

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Peningkatan Nilai Produksi Sektor Industri	Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n) – Nilai Produksi Sektor Industri tahun (n-1)	Data Industri	Bidang Perindustrian
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja pada sektor Formal dan Informal	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan pada sektor Formal dan Informal	$\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang Ditempatkan pada Sektor Formal dan Informal}}{\sum \text{Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100\%$	Dokumen Data Ketenagakerjaan	Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang memenuhi persyaratan kerja	$\frac{\sum \text{Perusahaan memenuhi persyaratan kerja}}{\sum \text{Total Perusahaan}} \times 100\%$ <b>Ket:</b> Perusahaan adalah Perusahaan dengan Kategori Menengah Keatas	Data Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama	Bidang Hubungan Industrial
		Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{\sum (\text{Kasus Perselisihan Hub Industrial tahun n}) - \sum (\text{Kasus Perselisihan Hub Industrial tahun n - 1})}{\sum (\text{Kasus Perselisihan Hub Industrial tahun n - 1})} \times 100\%$	Data perjanjian bersama dan anjuran	Bidang Hubungan Industrial
4.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
Tujuan	:	1. Meningkatnya nilai investasi Daerah; dan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan.
Indikator Tujuan	:	1. Persentase pertumbuhan nilai investasi; dan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
Tugas	:	Melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Fungsi	:	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2. Promosi Penanaman Modal; 3. Pelayanan Penanaman Modal; 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	$\frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n)} - \text{Nilai Realisasi Investasi Tahun (n - 1)}}{\sum \text{Nilai Realisasi Investasi tahun (n - 1)}} \times 100 \%$ <p>Ket: Niali Realisasi Investasi adalah Nilai Investasi PMA dan PMDN dengan data yang diperoleh dari Sistem Aplikasi OSS RBA (Detail Proyek dan Data LKPM)</p>	Laporan dari Sistem Aplikasi OSS RBA	Bidang Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas PMPTSP	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Laporan Hasil SKM	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo
Tujuan	: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur
IndikatorTujuan	: 1. Persentase ketersediaan infrastruktur; dan 2. Persentase infrastruktur berkualitas baik.
Tugas	: 1. Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 2. Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Umum	Persentase Fasilitas Umum yang Sesuai Standar Kontruksi	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang laik Fungsi}}{\text{Jumlah seluruh sarana dan Prasarana Umum di Kota}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Merupakan Sarana dan Prasarana Umum yang ada di kota probolinggo yang laik fungsi dimana terdapat Kelengkapan Fasilitas Seperti Kamar Mandi dan WC, sarana persampahan dan kebakaran, dan ruang untuk parking serta aman dimana terdapat fasilitas seperti bedak yang permanen dimana sudah di sekat tembok dan penutup bedak dan juga terdapat fasilitas pos jaga satpam</p>	Laporan Monev Keciptakaryaan	Bidang Cipta Karya
2.	Meningkatnya Kualitas Jalandan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan kota dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Panjang Jalan dalam Kondisi mantap adalah kondisi dimana kondisi jalan dengan tingkat kerusakan tidak lebih dari 60% dan tingkat kerusakan jalan tidak ada lubang dengan kedalaman lebih dari 20 cm</p>	Laporan Monev Kebinamargaan	Bidang Bina Marga

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Penataan Ruang Kota Sesuai RTRW	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	$\frac{\text{Jumlah Rumah dan Gedung yang sesuai tata ruang}}{\text{Jumlah Rumah dan Gedung di Kota}} \times 100\%$	Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
4.	Meningkatnya Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Irigasi Kota}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Kondisi baik adalah kondisi dimana tidak terdapat endapan sedimen yang tinggi, tidak terdapat banyak gulma, bersih dari sampah, dan plengsengan tidak rusak lebih dari 60% serta tidak kehilangan air yang melebihi 10% dari debit air</p>	Laporan Monev SDA	Bidang SDA
5.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Luasan Kumuh Yang Tertangani}}{\text{Jumlah Luasan Kumuh Kota}} \times 100\%$	Dokumen RP2KP	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
6.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	: Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
Tujuan	: 1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Kademangan; dan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kademangan
Indikator Tujuan	: 1. Persentase peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kademangan; dan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kademangan.
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada}} \times 100 \%$	Data Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Pelayanan</li> <li>• Kasi Pemerintahan</li> <li>• Kasi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	: Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
Tujuan	: 1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Kanigaran; dan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kanigaran.
Indikator Tujuan	: 1. Persentase peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kanigaran; dan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kanigaran.
Tugas	: 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Menyelenggarakan pelayanan publik; 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota; 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada}} \times 100 \%$	Data Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Pelayanan</li> <li>• Kasi Pemerintahan</li> <li>• Kasi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	: Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Kedopok; dan</li><li>2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kedopok.</li></ol>
Indikator Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kedopok; dan</li><li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kedopok.</li></ol>
Tugas	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>2. Menyelenggarakan pelayanan publik;</li><li>3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li><li>5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;</li><li>6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;</li><li>8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;</li><li>9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;</li><li>10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</li><li>11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li></ol>
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada}} \times 100 \%$	Data Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Pelayanan</li> <li>• Kasi Pemerintahan</li> <li>• Kasi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	:	Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Mayangan; dan</li><li>2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Mayangan.</li></ol>
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mayangan; dan</li><li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Mayangan.</li></ol>
Tugas	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>2. Menyelenggarakan pelayanan publik;</li><li>3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li><li>5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;</li><li>6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;</li><li>8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;</li><li>9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;</li><li>10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</li><li>11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li></ol>
Fungsi	:	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada}} \times 100 \%$	Data Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Pelayanan</li> <li>• Kasi Pemerintahan</li> <li>• Kasi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Instansi	: Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat Kecamatan Wonoasih; dan</li><li>2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Wonoasih.</li></ol>
Indikator Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase peningkatan cakupan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wonoasih; dan</li><li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Wonoasih.</li></ol>
Tugas	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li><li>2. Menyelenggarakan pelayanan publik;</li><li>3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li><li>4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</li><li>5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota;</li><li>6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li><li>7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;</li><li>8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;</li><li>9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;</li><li>10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan</li><li>11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li></ol>
Fungsi	: Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada}} \times 100 \%$	Data Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Kasi Pemas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan	IKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dokumen SKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasi Pelayanan</li> <li>• Kasi Pemerintahan</li> <li>• Kasi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>
3.	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Perkantoran yang ditangani sesuai ketentuan	$\frac{\% \text{ Capaian Pengelolaan Administrasi (Umum+ Kepegawaian+BMD+Program+Keuangan)}}{5}$	Dokumen Administrasi Perkantoran	Sekretaris

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

HADI ZAINAL ABIDIN